KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT: STUDI TENTANG SINERGITAS DAN KONTINUITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Budiman Rusli*
***Guru Besar Administrasi Publik FISIP UNPAD**

ABSTRAK :

Angka kemiskinan di Jawa Barat terus meningkat ,upaya untuk menanggulanginya belum berhasil walaupun telah dilakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada berbagai kebijakan yang terdiri dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, Permendagri No 42 yahun 2010 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang diarahkan untuk medeskripsikan makna yang ada dibalik fenomena yang diteliti yaitu masalah kemiskinan di Jawa Barat. Untuk mengumpulkan data selain dari sumber sekunder juga sumber primer melalui wawancara langsung dengan informan dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Jawa Barat belum berhasil ditekan karena program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Barar berjalan secara parsial kurang diperhatikan sinergitas dengan program yang digagas SKPD yang lain. Selain itu kontinuitas program perlu dijaga secara konsisten agar tahapan-tahapan penanngulangan kemiskinan memiliki agenda kegiatan yang jelas dan transparan.

Kata kunci: Kemiskinan, sinergitas**,** kontinuitas

The Policy of Poverty Eradication in west Java : A study of The synergy and continuity of Poverty Eradication Program

ABSTRACT :

The poverty level in west Java continues to rise despite the efforts which have been carried out so far. Various programs to eradicate the poverty refer to some policies consisted of Presidential Regulation 15/2010, Permendagri 42/2010, and Keputusan Gubernur Jawa Barat no.465.05/kep.1483-Bapp/2010 about TKPKD Province.

This research was carried out using qualitative method which aims to describe the meaning behind the phenomenon i.e. poverty problem in West Java. The data is obtained from secondary sources as well as primary sources through some interviews with the head of social department of west java.

The result shows that poverty level in West Java hasn"t been able to be reduced because the programs which were launched by SKPD in the province are run partially. Moreover, the program continuity needs to be taken care of consistently in order to make a clear and transparent activity agenda to eradicate the poverty.

Keywords: Poverty, synergy, continuity.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mendekati angka 250 juta orang, dengan tingkat kemiskinan menurut hasil sensus nasional Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, berkisar 13,33 % atau 31,02 juta orang. Angka ini tergolong tinggi karena berada di atas angka yang ditentukan pemerintah sebesar 8%.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah saat ini sedang berupaya menekan angka kemiskinan dengan cara mensinergikan program kemiskinan di tiap kementerian, dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena beberapa program penanggulangan kemiskinan di masing-masing kementerian dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara parsial dan berjalan masing-masing. Dengan sinergitas berbagai program diharapkan dapat mendorong upaya pemerintah untuk mempercapat penanggulangan kemiskinan melalui terobosan berbagai program dasar yang terbagi ke dalam tiga katagori utama yaitu:

1. program bantuan sosial berbasis keluarga (BLM, BOS, Jamkesmas, PKH).
2. program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri),
3. program berbasis pemberdayaan usaha kecil mikro dan kecil (KUR dan CSR),

Pengkatagorian program penanggulangan kemiskinan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.Sejalan dengan itu , batas garis kemiskinan di Indonesia pun turut berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Menurut BPS tahun 2011 batasan

kemiskinan diukur dari angka pengeluaran sebesar Rp 233.740 per bulan , ternyata dengan angka ini jumlah orang miskin masih belum dapat ditekan bahkan cenderung meningkat akibat pengaruh dari kondisi ekonomi yang belum stabil.

Demikian pula halnya di Jawa Barat, Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sudah diselenggarakan secara intensif sejak tahun 2010 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, karena menurut data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2011 dari jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 46.497.175 Jiwa, penduduk miskinnya mencapai 4.421,484 orang. Angka penurunan yang dicapai 2,.27%. masih jauh dari angka yang dicanangkan presiden melalui Perpres no. 15 tahun 2010 sebesar 8% sampai pada tahun 2014.

Program Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat memiliki dasar hukum yang kuat karena dilandasi tiga kebijakan yang tersusun secara sistemik dan satu sama lain saling memperkuat ,ketiga kebijakan dimaksud adalah :

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3 Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penurunan angka kemiskinan yang ditengarai disebabkan oleh lemahnya koordinasi,pada

derajat tertentu koordinasi dapat berperan sebagai tugas pengolahan informasi yang sangat penting (Stooner dan Freeman.!1994). Berbagai instansi yang terlibat terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan program-programnya yang parsial sehingga sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah provinsi dalam upaya memepercepat penaggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Jadi sebenarnya keterlibatan multi pihak dalam penangulangan kemiskinan potensial untuk terjadi inefisiensi dan kontra produktif. Efektivitas koordinasi antar instansi berkaitan dengan karakter dan struktur jaringan kerja sama (Alexander.1995)

Diterbitkannya Surat Keputusan gubernur Jabar tentang TKPKD memberi kekuatan yang mendorong upaya mensinergikan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga menghasilkan program yang terpadu, untuk mencapai sasaran yang telah disepakati bersama karena kebijakan pemerintah memberi pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak terkait.(W N. Dunn,2003). Kalau selama ini program-program instansi berjalan parsial, maka diharapkan dengan kehadiran Tim Koordinasi ini semua instansi dapat terkoordinir dengan baik.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penyebab utama kurang berhasilnya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat karena rendahnya sinergitas dan kontinuitas program dari instansi terkait,padahal yang diperlukan adalah keterpaduan gerak langkah baik dari segi perencanaan, pendanaan dan pelaksaaan. Dengan demikian penangulangan kemiskinan sebagai masalah mendasar di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya dapat diatasi secara simultan dan holistik karena malibatkan banyak instansi baik pusat maupun daeah.

Untuk mendorong kerja sama yang baik antar lembaga diluncurkan kebijakan Mendagri berupa Permendagri No. 42 tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan multi pihak dalam penangulangan kemiskinan potensial untuk terjadi inefisiensi dan kontra produktif, untuk itu diperlukan pengaturan yang tegas di lingkungan pemerintahan daerah karena kebijakan dapat memberikan pengetahuan dan advice bagi pelaksana (Vinning. 1989). Saran atau advice tersebut mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan pemecahan kedalam komponen-komponennya, tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis atas alternatif-alternatif baru. (Rusli,2013:)

Gubernur Jawa Barat meresponnya dengan mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi. Kebijakan ini dijadikan landasan oleh SKPD yang ada di lingkungan Pemprof Jabar untuk menggelar berbagai program penanggulangan kemiskinan masyarakat Jawa Barat. Hal yang menarik diamati adalah walaupun telah dibentuk Tim Koordinasi yang secara langsung mengatur kerja sama antar SKPD ini hasil yang diperoleh selama satu tahun program ini diluncurkan, belum sesuai dengan harapan padahal target pencapaian telah ditentukan batas waktunya yaitu tahun 2014.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Latar Belakang Penelitian, dapat diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat belum terintegrasi dengan baik walaupun telah dibentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat, berbagai istansi/SKPD berjalan masing-masing secara parsial. Hal ini tidak dapat dihindari karena program penanngulangan

masalah kemiskinan bersifat multi pihak ,masing-masing membuat perencanaan dan program yang khas sesuai visi dan misinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menjabarkan rumusan masalah tersebut ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat ?

MetodePenelitian

Disain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada problem solving.Dengan penggunaan metode penelitian ini penelitian fokus pada upaya mendeskripsikan fenomena yang terjadi berkaitan dengan kebijakan publik tentang Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkap makna dibalik sebuah fenomena yang diteliti dan secara empiris sedang terjadi pada saat peneliti berada di lapangan. Instrumen penelitian yang utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiridengan melakukan wawancara secara langsung terhadap informan yang peniliti tetapkan . Pemilihan informan berkaitan dengan relevansi dan penguasaan masalah yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Perpres no. 15 tahun 2010 dijelaskan bahwa perlu ada strategi yang dijadikan acuan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan di seluruh propinsi termasuk di Jawa Barat. Strategi dimaksud disusun secara sistematis ke dalam empat tahap dan dilengkapi pula program-program yang merupakan kegiatan teknis dari semua strategi yang telah disusun.Susunan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN :

1	2	3	4
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN

1	2	3	4
Bantuan sosial berbasis individu, rumah tangga atau keluarga	Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat	Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil	Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat,Thn 2013

Strategi dan program penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang diprioritaskan pemerintah dan secara serempak setiap provinsi harus menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010. Di Jawa Barat kebijakan nasional tersebut dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih teknis berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, di Provinsi Jawa Barat setiap SKPD telah membuat program masing-masing, sebagai contoh disampaikan beberapa program dari SKPD yang difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2012. Program Pemberdayaan Usaha Pertanian Tanaman Pangan kepada 1.110 orang petani dengan lokasi:

1. Sumedang
2. Bandung
3. Sukabumi
4. Purwakarta
5. Bandung Barat
6. Garut

Hasil yang dicapai : Berkembangnya nilai tambah dan daya saing usaha pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.

2. **Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat**.

Tahun 2012 membuat program dalam bentuk bantuan kepada 80 orang peternak itik (4 kelompok). Setiap kelompok mendapat bantuan terdiri

dari 440 ekor ternak, 5.280 kg pakan ternak, bahan baku kandang: 1 paket, vaksin dan obat-obatan:1 paket, mesin tetas: 1 paket, dan pakaian kerja lapangan: 1 paket

Lokasi :

1. Kab. Cirebon,
2. Kab. Kuningan,
3. Kab. Indramayu,
4. Kab. Majalengka

Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat miskin sebanyak 80 orang dalam melakukan usaha agribisnis ternak itik

3. **Dinas Perikanan dan Kelautan**

Tahun 2012 membuat program Usaha :

3.1. Budidaya Ikan Lele Sangkuriang kepada 40 orangpeani.

Lokasi :

1. Kab. Bogor,
2. Kab. Subang,
3. Kab. Karawang,

Hasil yang dicapai: Meningkatnya hasil panen sebanyak 720.000 ekor benih lele sangkuriang ukuran 7 – 8 cm

3.2. Budidaya Ikan Hias kepada 60 orang petani

Lokasi :

1. Kota Bandung,
2. Kota Depok
3. Kabupaten Bekasi

Hasil yang dicapai : Panen 110.400 ekor ikan hias Ukuran 2-3 Cm

3.3. Usaha Budidaya Ikan Gurame, kepada 60 orang petani

Lokasi :

1. Kab. Tasikmalaya
2. Kota Tasikmalaya
3. Kab. Ciamis

Hasil yang dicapai : Panen720.000 ekor benih gurame uk. 1 cm/kuku

4. Dinas Kehutanan.

Tahun 2012 membuat program Penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan (Pengembangan Budidaya Lebah Madu Dan Jamur Kayu)

Lokasi:

1. Desa mekarwangi, Desa Cibodas, Desa langensari kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat
2. Desa ciburial Kec. Cimenyan Kabupaten Bandung

Hasil yang dicapai : Meningkatnya pendapatan petani lebah madu (+ Rp 500.000,-/Bulan (Umumnya Buruh Tani) Penghasilan Tambahan Dari Hasil Budi Daya Lebah

5. Badan Ketahanan Pangan Daerah.

Tahun 2012 membuat program

5.1. Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat di 17 Kabupaten dan 3 Kota,dengan sasaran 149 Lumbung Pangan Masyarakat

Hasil yang dicapai : Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat dalam rangka Mengurangi Tingkat Kerawanan Pangan

5.2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 14 Desa dengan sasaran 149 Lumbung Pangan Masyarakat.

Hasil yang dicapai :Terbangunnya Desa Mandiri Pangan dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Pangan

5.3. Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan di 17 Kabupaten,dengan sasaran 190 Desa

Hasil yang dicapai : Meningkatnya Gizi Keluarga

5.4. Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan di 3 Kabupaten, sasaran 255 KK

Hasil yang dicapai : Tersedianya cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tahun 2012 membuat program Pengembangan Kewirausahaan Industri Keciluntuk240 orangpebgusaha industry kecil.

Lokasi :

1. Kota Bogor

2. Kota Banjar
3. Kab. Cirebon
4. Kota Cimahi
5. Kabupaten Bekasi
6. Kabupaten Sukabumi

Hasil yang dicapai :Meningkatnya pengetahuan di bidang makanan, Tekstil dan Produk Tekstil serta Kerajinan

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan di Jawa Barat, nampak bahwa satu sama lain barjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh dinas-dinas berdasarkan kesiapan anggaran masing-masing. Pada tahun 2012 tercatat enam dinas telah menyelesaikan program penanggulangan kemiskinan yaitu : Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdaganan. Penelitian ini membatasi pada program-program yang dilakukan tahun 2012 dan telah selesai.Pada umumnya program-program tersebut ditindak lanjuti pada tahun 2013 dan sekarang masih berjalan.

Menurut TKPKD target penurunan angka kemiskinan saat ini masih mendekati 1 %, sedikit lagi pencapaian angka yang ditargetkan 1%, karena ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan terutama berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan yang terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ketika ditanyakan :

Mengapa program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat belum mencapai sasaran yang diharapkan yaitu 1% tahun 2012?

Menurut beliau, selain karena jumlah pertambahan penduduk Jawa Barat yang lebih besar yaitu 2%, juga pembangunan ekonomi mikro terlalu berorientasi pada transaksi keuangan, sehingga kurang menyentuh program-program pemberdayaan ekonomi sektor riilyang langsung berhubungan dengan pertumbuhan usaha kecil. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait kesannya jalan sendiri-sendiri,tidak terintegrasi sehingga hasil akhir yang dicapai tidak maksimal.

Ketika ditanyakan lebih lanjut : Mengapa sulit untuk merealisasikan , Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi?, dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa lembaga/dinas, baik di pusat maupun di daerah yang masing-masing memiliki target sendiri dan sumber dana yang parsial, sehingga berdampak pada program-program yang parsial pula,upaya untuk melakukan integrasi sering kaliterkendala masalah managerial yang terkotak-kotak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebenarnya kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan ini sudah cukup lengkap karena dipayungi Perpres no. 15 tahun 2010tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota,kemudian diturunkan ke dalam aturan teknis Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi. Hanya ketika implementasi di lapangan masalah koordinasi masih menjadi kendala. Ole karena itu menurut Kepala dinas Sosial harus dilakukan sinkronisasi sejak perencanaan. Selengkapnya pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah teknis ketika program-program yang telah disusun itu kemudian diimplementasikan oleh setiap SKPD?

Ada beberapa hal yang harus menjadiperhatian berkaitan dengan penerapan program penanggulangan kemiskinan yaitu :

1. Perlu diperhatikan adanya integrasi program dimulai dari perncanaan program, pelaksanaannya dan interaksi antar lembaga terkait, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik kapan saja terutama ketika menghadapi kendala di lapangan.
2. Pendanaan program yang bersifat parsial kurang mendorong efektivitas pencapaian hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendanaan program lintas lembaga tanpa mengurangi segi akuntabilitas yang harus dilakukan oleh setiap lembaga terkait.
3. Kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah perlu ditata kembali, mengingat masalah penanggulangan kemiskinan melibatkan banyak instansi/lembaga yang berjalan masing-masing secara parsial. Perlu ada koordinasi yang baik sehingga setiap program yang dilakukan membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi.
4. Perlu dijalin tatanan yang lebih apik dalam pengaturan kerja sama dengan lembaga non pemerintah,seperti dengan dunia usaha dan LSM. Ke depan masalah penanggulangan kemiskinan akan banyak melibatkan sektor non publik terutama dunia usaha. Dengan demikian beban pemerintah tidak terlalu berat dalam menyusun program yang domainnya lebih mengarah kepada upaya pengembangan sektor ril yang langsung bersentuhan dengan masalah kehidupan ekonomi rakyat kecil seperti pengembangan

usaha kecil melalui kredit usaha rakyat, atau pembangunan sarana kesehatan raktat serta paket pendidikan gratis di tingkat dasar. Untuk itu peran swasta dapat dikembangkan melaluiprogram CSR.

Provinsi Jawa Barat tetap memiliki komitmen untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan target 1 % stiap tahun. Dengan target 1 % ini diharapkan amanat yang disampaikan dalam Perpres no. 15 tahun 2010 yaitu terjadi penurunan angka kemiskinan di daerah secara signifikan. Dalam hal ini pemerintah pusat telah mencanangkan capaian target secara nasional tahun 2014 sebesar 8 %.

Perlu pendekatan yang sistemik dan terpadu untuk merealisasikan program pengurangan angka kemiskinan yang melibatkan banyak pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga pihak atau lembaga lain di luar pemerintahan. Konsep ini dikenal dengan "Intervensi Multi pihak". Pendekatan dimaksud melibatkan dunia usaha,akademisi dan LSM. Pengurangan angka kemiskinan perlu didekati dari berbagai aspek, tidak hanya ekonomi tetapi unsur-unsur lain yang menunjang keberhasilan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakatdengan Mensinergi-kan Program/Kegiatan/Pekerjaan untuk Mengurangi Kemiskinan dengan memadukan program daerah Dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Dari data di lapangan diperoleh pula informasi bahwa masalah keakuratan data masih mengganjal pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, sering kali terjadi perbedaan data yang disajikan oleh BPS dengan data yang dimiliki pemerintah daerah termasuk dalam hal ini data yang bersumber dari wilayah kota dan kabupaten sehingga menyulitkan pihak TKPKD dalam memprediksi besaran anggaran dan target yang ingin dicapai. Oleh karena itu perlu ada pembicaraan yang serius antara BPS dan pemerintah daerah untuk melakukan rekap data agar lebih akurat.Penurunan kemiskinan sangat tergantung dari ketepatan dalam perhitungan, karena

apabila tidak ada yang mengawasi antara instansi yang terkait, maka sangat rentan terjadi manipulasi angka. Sering terjadi pada masa lalu sebuah wilayah di daerah tertentu menyatakan bahwa penduduk miskin di wilayahnya telah berkurang dalam jumlah yang banyak,hal ini dilakukan untuk mengkalim bahwa pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerahnya berhasil dan ini sebuah prestasi untuk memperoleh prestise, akan tetapi pada kesempatan lain, tatkala berkaitan dengan masalah bantuan untuk penduduk miskin, maka data warga miskin di naikkan jumlahnya dengan maksud agar bantuan yang diterima menjadi lebih besar. Gambaran ini mencontohkan betapa dianggap sepelenya data penduduk miskin malah dijadikan komoditi untuk mencari keuntungan, ini sangat berbahaya bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/ kota dalam mengambilkebijakan yang akurat. Teknologi modern saja tidak cukup perlu pula *diback up* dengan perhitungan manual dalam perhitungan jumlah penduduk miskin agar bisa saling melengkapi dan *re check* sehingga bisa meminimalisir setiap bentuk kesalahan dan kejanggalan hasil rekap data yang dijadikan dasar penyususnan program-program yang *pro poor*.

KESIMPULAN.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin walaupun masih di bawah target yang ditetapkan. Sebagai penyebabnya adalah selain karena melibatkan banyak instansi dan lembaga baik pusat maupun daerah, juga karena instansi/lembaga yang tekait berjalan masing-masing secara parsial, sehingga penyelenggaraan program tidak terfokus.

Pada tahun 2012 ada enam SKPD di Jawa Barat yang sudah memulai program penanggulangan kemiskinan yaitu dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Ketahan Pangan dan dina Perikanan dan Kelautan. Untuk mengkoordinir SKPD tersebut maka

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tugasnya adalah menjadi koordinator atas kerja SKPD yang terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Kinerja SKPD tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan terus dilanjutkan sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan hasil capaian yang maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam Perpres. 15 tahun 2010 sebesar 8 % pada tahun 2014. Bahkan SKPD yang terlibat tidak terbatas pada enam lembaga saja akan tetapi semua DKPD yang ada akan menyusun program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Alexander,Ernest,R.1995.*HowOrganizationAct Together:Interorganizational Coordination in Theory and Practice*, Amsterdam: Naherland:Gordon and Breach Publishers

Budiman Rusli. 2013 .*Kebijakan Publik:Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Dunn William N, 2003. " *Public Policy Analysis* " : *An Introduction. New Jersey : Prentice Hall International Inc,* .

Stooner,J AF. And Freeman.!1994. *Manajemen*. Terjemahan Welhelmus. Intermedia.Jakarta

Vinning Aidan R, David L. Weiner and. 1989 " *Policy Analysis : Concepts and Practice.* New Jersey: Prentice Hall Inc,.

Sumber-Sumber Lain:

- Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
- Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No 465.05/kep.1483-Bapp/2010 tentang TKPKD Provinsi.